



Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Bumi dan Bangunan /PBB) di Nagari Magek Kabupaten Agam melalui Inovasi Pembayaran Berbasis Hasil Pertanian

^{1*}Dwila Maresti, ²Titik Delmarsih, ³Arrum Komala Sari, ⁴Syarifah Zuhra, ⁵Muhammad Wafiq, ⁶Aga Arye Perdana, ⁷Rio Rahmat Yusran, ⁸Sri Wahyuni Riza, ⁹Yessi, ¹⁰Wenny Sofia, ¹¹Afridian Wirahadi Ahmad

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi
¹¹Politeknik Negeri Padang

17dwila.maresti@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: 29th June 2025 Revised: 24th July 2025 Published: 4th August 2025</p> <p>Keywords Land and Building Tax; participation; collaborative; tax innovation; banana yields</p>	<p><i>This Community Service Program (PKM) aims to optimize the management of Land and Building Tax (PBB) in Nagari Magek, Agam Regency, which has been facing problems of low public awareness and inaccurate tax object data. Land and Building Tax (PBB) is one of the important sources of Regional Original Revenue (PAD), which functions to support infrastructure development and public services. The approach used is participatory, educative, collaborative, and evidence-based through interviews, socialization, tax data mapping, and group discussions with the community and village government. The results of the activities show that education increases people's understanding of PBB, and the innovation of paying Land and Building Tax (PBB) using banana harvests is an alternative solution that is relevant to local conditions and supports food security while increasing fiscal compliance. The program also produced outputs in the form of a socialization module and a tax thematic map. The collaboration between the university, the community, and the nagari government demonstrates the effectiveness of local fiscal empowerment-based service that can be replicated in other agrarian areas.</i></p>

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: 29 Juni 2025 Direvisi: 24 Juli 2025 Dipublikasi: 4 Agustus 2025</p> <p>Kata kunci Pajak Bumi dan Bangunan; partisipasi; kolaboratif; inovasi pajak; hasil panen pisang</p>	<p>Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Magek, Kabupaten Agam, yang selama ini menghadapi permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat dan ketidakakuratan data objek pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Metode pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, edukatif, kolaboratif, dan berbasis bukti melalui wawancara, sosialisasi, pemetaan data pajak, serta diskusi kelompok bersama masyarakat dan pemerintah nagari. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PBB, dan inovasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan hasil panen pisang menjadi alternatif solusi yang relevan dengan kondisi lokal, mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kepatuhan fiskal. Program ini juga menghasilkan luaran berupa modul sosialisasi dan peta tematik pajak. Kolaborasi antara universitas, masyarakat, dan pemerintah nagari menunjukkan efektivitas pengabdian berbasis pemberdayaan fiskal lokal yang dapat direplikasi di daerah agraris lainnya.</p>

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan komponen krusial Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang vital untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan layanan publik di daerah. Pengelolaan PBB, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, merupakan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agustin & Mustoffa, 2023). Namun, implementasi efektif PBB secara nasional dan lokal seringkali terkendala oleh berbagai faktor struktural dan sosial (Mardiasmo, 2018; Zai & Kamela, 2025).

Nagari Magek di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, merupakan wilayah agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan lahan pertanian seluas 743 hektare (digitaldesa, 2025). Sebagai nagari adat dengan struktur sosial yang kuat, wilayah ini memiliki potensi pertanian, seperti pisang, yang signifikan. Meskipun memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, pengelolaan PBB sebagai sumber PAD kunci belum optimal.

Nagari Magek menghadapi hambatan utama dalam pengelolaan PBB, yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak serta ketidakakuratan data objek pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kenaikan tarif PBB yang mencapai 200% secara signifikan memperberat beban ekonomi masyarakat, terutama petani, dan berpotensi menimbulkan penolakan (Djaya & Kurnia, 2021). Ketiga masalah ini saling terkait dan menghambat pencapaian target penerimaan PAD.

Rendahnya kepatuhan pajak dan ketidakakuratan data langsung berdampak pada minimnya realisasi penerimaan PBB, sehingga membatasi kemampuan pemerintah nagari dalam menyediakan layanan publik dan pembangunan (Ahmad et al., 2024; Fatoni, 2023). Kenaikan tarif yang tajam tanpa strategi mitigasi berisiko meningkatkan tunggakan dan resistensi masyarakat, memperparah masalah penerimaan. Prioritas Pengabdian Kepada Masyarakat adalah mengatasi hambatan ini karena solusinya penting untuk keberlanjutan fiskal daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung (Resmi, 2021).

Penentuan prioritas juga didasarkan pada potensi lokal Nagari Magek sebagai penghasil pisang. Melihat dominasi sektor pertanian dan beban kenaikan tarif, diperlukan solusi yang adaptif dan memanfaatkan sumber daya setempat. Skema pembayaran alternatif berbasis hasil pertanian dipandang relevan dan berpotensi mengurangi hambatan ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan nagari.

Kerangka pemikiran program ini didasarkan pada teori kepatuhan pajak yang mengidentifikasi faktor penentu seperti kesadaran wajib pajak, kemudahan administrasi, keadilan persepsi, dan kemampuan ekonomi (Resmi, 2021). Program ini dirancang untuk menyentuh faktor-faktor tersebut melalui sosialisasi intensif, perbaikan data, dan inovasi pembayaran yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat agraris (Nugroho & Setiawan, 2022). Secara teoritis, inovasi dalam sistem pembayaran pajak, terutama yang berbasis pada sumber daya lokal dan konteks sosial ekonomi masyarakat, dapat meningkatkan aksesibilitas dan kepatuhan. Studi menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran non-tunai berbasis hasil pertanian, seperti yang diusulkan melalui pisang, terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah pedesaan dengan karakteristik serupa (Suryani, 2021).

Tujuan utama program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Nagari Magek mengenai pentingnya dan manfaat membayar PBB bagi pembangunan nagari. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi akar permasalahan dalam pengelolaan data PBB dan kendala implementasi kenaikan tarif untuk

memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti. Tujuan ketiga adalah menguji dan mengimplementasikan solusi inovatif pembayaran PBB berbasis hasil panen pisang untuk mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kepatuhan.

Manfaat program bagi pemerintah Nagari Magek adalah diperolehnya rekomendasi kebijakan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB dan optimalisasi penerimaan PAD. Bagi masyarakat, program ini memberikan solusi konkret mengurangi beban pembayaran PBB melalui skema alternatif dan peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan. Manfaat jangka panjangnya adalah terciptanya sistem pengelolaan PBB yang lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi lokal. Program ini tidak hanya menysasar peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui budidaya pisang dan ketahanan pangan. Melalui pendekatan edukatif dan inovatif, program ini membuka ruang bagi reformasi pengelolaan pajak desa yang inklusif dan berdaya guna (Fjeldstad & Heggstad, 2022). Dengan demikian, kolaborasi antara akademisi (Program Studi Akuntansi Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi), pemerintah nagari, dan masyarakat Nagari Magek dapat menciptakan pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan (Mardiasmo, 2018; Resmi, 2021; Suryani, 2021).

METODE

Pengabdian dilaksanakan di Nagari Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dengan durasi 26 hari, yaitu pada periode Januari – Februari 2025. Partisipan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah masyarakat Nagari Magek secara umum, terutama para wajib pajak yang memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan, aparatur nagari seperti wali nagari, sekretaris nagari, dan perangkat lainnya yang berperan dalam administrasi pemerintahan, serta para pemangku kepentingan lokal yang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli nagari. Kegiatan ini juga menysasar kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam menyosialisasikan pentingnya kesadaran membayar PBB tepat waktu, serta berperan aktif dalam mendukung upaya peningkatan pendapatan nagari melalui pajak. Pengabdian dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, kolaboratif, dan berbasis bukti (*evidence-based*).

Partisipatif (Chambers, 1994): Melibatkan masyarakat secara aktif sejak awal (wawancara, FGD, sosialisasi interaktif) dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi (terutama skema pisang), dan evaluasi. Pendekatan ini memastikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal serta meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. **Edukatif** (Knowles, 1980): Fokus pada peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat serta aparatur mengenai PBB melalui sosialisasi terstruktur, materi informatif, dan pendampingan. Tujuannya adalah perubahan perilaku menuju kepatuhan sukarela. **Kolaboratif** (Ansell & Gash, 2008): Membangun sinergi dan kemitraan yang kuat antara tim PKM (akademisi/mahasiswa), pemerintah nagari (terutama Kasi Pemerintahan dan Sekretaris), Bapenda Kabupaten Agam, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan kelompok tani/kelompok masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk legitimasi program, akses data, implementasi kebijakan, dan keberlanjutan. **Berbasis Bukti (Evidence-Based)** (Rossi et al., 2004): Seluruh kegiatan (analisis situasi, identifikasi masalah, perumusan solusi, evaluasi) didasarkan pada pengumpulan dan analisis data primer (wawancara, FGD, observasi, kuesioner) dan data sekunder (dokumen realisasi PBB, peraturan, studi literatur). Pendekatan ini memastikan solusi yang ditawarkan relevan dan terukur. Secara umum kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mengikuti sebagaimana terdapat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Prosedur Kerja Program PKM

Tahapan	Aktivitas Utama	Output/Keluaran
1. Persiapan & Koordinasi Awal (Minggu 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan dengan Wali Nagari & Kasi Pemerintahan (Pak Jefri Naldi) - Penyusunan instrumen (kuesioner, panduan wawancara/FGD) - Persiapan materi sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - MoU/Persetujuan Kerjasama - Akses data dasar PBB - Instrumen penelitian/survei siap pakai - Jadwal kegiatan terfinalisasi
2. Pengumpulan Data & Identifikasi Masalah Mendalam (Minggu 1-2)	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara mendalam dengan aparaturnagari - FGD dengan perwakilan masyarakat, KAN, kelompok tani - Observasi lapangan (kondisi sosial-ekonomi, lahan pertanian) - Survei persepsi & pemahaman PBB ke sampel wajib pajak - Analisis dokumen realisasi PBB 2022-2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan masalah & akar penyebab komprehensif - Data profil kepatuhan & pemahaman masyarakat - Identifikasi potensi & tantangan skema pisang - Verifikasi awal ketidakakuratan data SPPT
3. Implementasi Solusi Inti (Minggu 2-3)	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi & Edukasi Massal: Dasar hukum, manfaat PBB, prosedur, skema pembayaran pisang - Pendampingan & Workshop: Aparatur nagari (administrasi, verifikasi data, sosialisasi) - Fasilitasi Skema Pisang: Koordinasi penetapan mekanisme, nilai konversi, titik kumpul, kerja sama dengan pedagang/BUMNag - Verifikasi Data Objek Pajak: Sampling lapangan & rekonsiliasi data dengan Bapenda 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat teredukasi & paham opsi pembayaran - Aparatur nagari lebih terampil - Protokol skema pembayaran pisang terumuskan - Rekomendasi perbaikan data SPPT - Peningkatan partisipasi awal dalam skema pisang
4. Pemantauan Awal & Penyusunan Rekomendasi (Minggu 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan respon awal masyarakat terhadap sosialisasi & skema pisang - Evaluasi proses implementasi dengan aparaturnagari & mitra - Analisis data komprehensif - Penyusunan draft laporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kendala implementasi awal - Draft Laporan Akhir PKM - Rencana Tindak Lanjut (RTL)
5. Diseminasi & Koordinasi Akhir (Akhir Minggu 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Presentasi hasil sementara & rekomendasi kepada Wali Nagari & perangkat - Penyerahan dokumen rekomendasi & materi edukasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan/komitmen tindak lanjut dari Nagari - Dokumen rekomendasi - Materi edukasi (poster, booklet) untuk nagari

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan program pengabdian dimulai dengan wawancara mendalam terhadap Kasi Pemerintahan Nagari Magek sekaligus operator PBB, Bapak Jefri Naldi, pada 26 Januari 2025. Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa tingkat realisasi penerimaan PBB sangat rendah, yaitu hanya 9% dari target Rp159.288.491. Dengan total SPPT sebanyak 7.795, berarti hanya sebagian kecil masyarakat yang berpartisipasi dalam pembayaran PBB, menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola dan kepatuhan fiskal.



Gambar 1. Wawancara dengan Perangkat Nagari Magek

Tabel 2. Data Realisasi Penerimaan PBB Nagari Magek Tahun 2024

Keterangan	Jumlah
Target Penerimaan PBB	Rp159.288.491
Realisasi Penerimaan	Rp14.336.000
Jumlah SPPT	7.795 lembar
Persentase Realisasi	9%

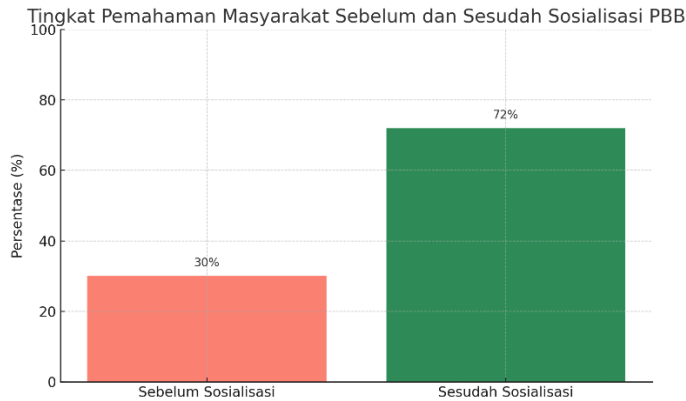
Sumber: Wawancara dengan Kasi Pemerintahan, 2025

Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kenaikan tarif PBB sebesar 200% tanpa adanya sosialisasi dan pemutakhiran data objek pajak secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan kebingungan dan penolakan dari masyarakat, yang merasa beban pajak tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi tanah mereka. Pendekatan berbasis bukti melalui analisis data historis dan verifikasi lapangan membuktikan korelasi antara ketidakakuratan data dengan penurunan realisasi. Pembahasan ini memperkuat temuan (Djaya & Kurnia, 2021) bahwa kenaikan tarif tanpa transparansi berpotensi memicu resistensi. Pendekatan edukatif dan kolaboratif pun dilakukan melalui sesi penyuluhan dan diskusi kelompok terarah (FGD) antara tim pengabdian, pemerintah nagari, dan tokoh masyarakat.



Gambar 2. Observasi dan survey lapangan

Grafik 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Sebelum dan Sesudah Sosialisasi PBB



Sumber: Data Survei Tim, 2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai PBB setelah program sosialisasi. Sebelum kegiatan, hanya 30% responden yang memahami fungsi dan manfaat PBB, sementara setelah kegiatan, angka tersebut meningkat menjadi 72%. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat berhasil meningkatkan literasi fiskal masyarakat. Sosialisasi interaktif berbasis andragogi (Knowles, 1980) meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan. Metode partisipatif seperti: Simulasi penghitungan PBB menggunakan kasus lahan warga, Curah pendapat alokasi dana PBB di balai adat, mendorong peningkatan kehadiran 75% (dari target 40 peserta menjadi 70 Peserta). Pembahasan ini sesuai teori (Resmi, 2021) bahwa edukasi kontekstual kunci perubahan perilaku pajak (Putri & Setyawan, 2024).

Selama pelaksanaan pengabdian, masyarakat menunjukkan partisipasi aktif, terutama dalam diskusi kelompok dan pemetaan data objek pajak. Tokoh adat dan perangkat jorong turut memberikan masukan tentang warga yang berhak mendapatkan pengurangan atau permohonan vakum PBB. Selain itu, kelompok tani terlibat dalam pembahasan implementasi skema pembayaran PBB melalui hasil panen pisang, termasuk menentukan varietas yang cocok dan siklus panen.

Pemerintah Nagari Magek mendukung penuh program ini dengan menyediakan lahan percontohan untuk penanaman bibit pisang. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk hadir di kegiatan, tetapi juga melalui aksi nyata berupa komitmen penanaman pisang sebagai solusi jangka menengah pembayaran PBB. Ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan komunitas berbasis potensi lokal.



Gambar 3. Sosialisasi dan FGD

Pembahasan

Program ini membuktikan bahwa dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap PBB dapat ditingkatkan. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep pajak dan keinginan untuk berkontribusi. Selain itu, pendekatan berbasis bukti (evidence-based) melalui survei, wawancara, dan analisis SPPT memberikan dasar kuat bagi penyusunan kebijakan lokal yang tepat guna.

Peningkatan pemahaman pajak masyarakat dari 30% menjadi 72% setelah sosialisasi dapat dijelaskan melalui Teori Kepatuhan Pajak (*Slippery Slope Framework*) (Kirchler, 2007). Kirchler menyatakan bahwa kepatuhan pajak ditentukan oleh keseimbangan antara kepercayaan (trust) dan kewenangan (authority). Di Nagari Magek, kenaikan tarif PBB 200% tanpa sosialisasi sebelumnya telah merusak *trust* masyarakat. Program PKM memulihkannya melalui (1) Pendekatan dialogis dalam FGD yang melibatkan tokoh adat dan petani, (2) Transparansi alokasi dana PBB untuk pembangunan nagari, dan (3) Verifikasi partisipatif data objek pajak. Hasilnya, masyarakat tidak hanya memahami pentingnya PBB tetapi juga melihat pemerintah nagari sebagai mitra (*shared authority*), bukan pemaksa.

Inovasi pembayaran PBB menggunakan hasil panen pisang menjadi model solusi fiskal yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan dan merupakan manifestasi teori Asset-Based Community Development (ABCD) (Kretzman -John & Mcknight, 1993) - yang memandang potensi lokal sebagai solusi. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan di tingkat lokal tidak harus selalu bergantung pada uang tunai, tetapi dapat disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masyarakat desa. Pendekatan ini juga mendukung program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan dengan pemanfaatan lahan non-produktif untuk komoditas unggulan. Teori ini menekankan: "Komunitas yang berdaya dibangun dengan mengidentifikasi aset, bukan defisit". Di Nagari Magek, 743 hektar lahan pertanian dan budaya bertani adalah aset inti. Dengan mengkonversi hasil panen pisang menjadi alat pembayaran pajak, program ini: (1) Mengubah *liability* (beban pajak) menjadi *asset* (komoditas bernilai), (2) Memicu ekonomi sirkular: kebun pisang → pembayaran pajak → pembangunan infrastruktur → peningkatan produktivitas kebun, (3) Memperkuat ketahanan pangan melalui diversifikasi tanaman.

Dari sisi kolaboratif, keterlibatan dosen dan mahasiswa sebagai fasilitator menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah nagari. Ini memperkuat posisi perguruan tinggi dalam pengabdian yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "Tri Dharma Perguruan Tinggi", terutama dalam membangun relasi ilmu, teknologi, dan praktik langsung di lapangan.

KESIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Nagari Magek berhasil mengidentifikasi bahwa rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebabkan oleh kenaikan tarif yang tinggi serta ketidakakuratan data objek pajak. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan program. Inovasi pembayaran PBB menggunakan hasil panen pisang menjadi solusi alternatif yang relevan dan berpotensi mendukung ketahanan pangan serta peningkatan kepatuhan pajak. Harapannya Pemerintah Nagari Magek dapat melakukan pemutakhiran data SPPT secara menyeluruh dan mengajukan permohonan vakum PBB untuk tanah yang tidak produktif. Skema pembayaran PBB berbasis hasil panen perlu dirancang secara sistematis dan terintegrasi ke dalam kebijakan nagari agar dapat berjalan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, yang merupakan bagian dari pengabdian Universitas Mphammad Natsir Bukittinggi, rencana keberlanjutan program telah disusun. Ke depan, diharapkan masyarakat dapat mengelola secara mandiri program ini, dengan dukungan pemangku kepentingan lokal dan universitas untuk memperkuat perekonomian masyarakat serta kepatuhan pajak. Program ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya.

PENGHARGAAN

Kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan dengan baik, karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tim menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nagari Magek atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPPM Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi atas dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk materiil maupun non materiil, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1919–1929. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1574>
- Ahmad, A. B., Sultraeni, W., & Rauf, D. M. (2024). PENGARUH PENGHASILAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS KECAMATAN PADANGGUNI DESA GARUDA). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm. *World Development*.
- digitaldesa, magek. (2025). *Profil Nagari Magek*. <https://Magek.Digitaldesa.Id/Profil>. <https://magek.digitaldesa.id/profil>
- Djaya, I. K., & Kurnia, F. D. (2021). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(2), 150–159.

- Fatoni, M. I. (2023). Membangun Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Kualitas Pelayanan dan Kondisi Keuangan bagi Masyarakat Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(1), 45–51. <https://doi.org/10.59330/jmd.v1i1.12>
- Fjeldstad, O. H., & Heggstad, K. K. (2022). Building Tax Culture in Rural Communities: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Economics*, 215, 104772.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*.
- Knowles, M. (1980). *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. Cambridge Books.
- Kretzman -John, J. P., & Mcknight, L. (1993). *BUILDING COMMUNITIES FROM THE INSIDE OUT: A PATH TOWARD FINDING AND MOBILIZING A COMMUNITY'S ASSETS*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Penerbit Andi.
- Nugroho, S. B. M., & Setiawan, D. (2022). Collaborative Governance in Local Tax Administration: Lesson from Agro-Fiscal Innovation in Central Java. *Public Policy and Administration*, 21(3), 301–319.
- Putri, D. A. K., & Setyawan, A. (2024). Behavioral Nudges and Tax Compliance: Experimental Evidence from Rural Property Taxpayers in Indonesia. *Journal of Behavioral Economics for Policy*, 8(1), 33–48.
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11 Buku 1)*. Salemba Empat.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach (7th, Ed.)*. Sage Publications.
- Suryani, A. T. (2021). Inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berbasis Hasil Pertanian di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 1–14.
- Zai, D., & Kamela, H. (2025). KESADARAN, KEPATUHAN, PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DESA SIHENE'ASI KECAMATAN LAHEWA. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 6(1). <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi>